E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2942-2953
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

# Persepsi Generasi Muda Dalam Film Amplop Demokrasi Terhadap Politik Uang Pilkada

**Lulu Aperianti[1], Sofa Sofianty[2], Raihan Azaki[3], Ricky Kuswanda[4]**

[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: luluaperianti123@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini membahas representasi politik uang dalam film dokumenter Amplop Demokrasi dan persepsi generasi muda terhadap fenomena tersebut dalam Pilkada di Indonesia. Politik uang adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi dalam demokrasi lokal dan dinilai bisa merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum. Film Amplop Demokrasi menunjukkan berbagai macam praktik politik uang seperti pembagian amplop, serangan fajar, dan pemberian uang secara tersembunyi kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik poltik uang direpresentasikan dalam film tersebut dan bagaimana generasi muda memaknai representasi tersebut. Metode penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan teori representasi Stuart Halll. Data didapatkan dari observasi terhadap film dokumenter dan wawancara dengan lima mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023 yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling.* Hasil penelitian didapatkan bahwa film Amplop Demokrasi sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Selain itu, generasi muda memandang praktik politik uang sebagai tindakan yang merusak kualitas demokrasi karena masyarakat cenderung memilih berdasarkan imbalan materi dibanding kualitas calon pemimpin. Film dokumenter tersebut juga membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang, penguatan kesadaran masyarakat, serta partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa film dokumenter bisa menjadi sarana pendidikan politik begi generasi muda dalam memahami berbagai persoalan demokrasi Indonesia. Mahasiswa selaku kelompok penekan dalam masyarakat diharapkan bisa berperan dalam menciptakan pilkada yang lebih berintegritas

**Kata Kunci:** Politik Uang, Pilkada, Representasi, Generasi Muda, Demokrasi

**Abstract**

This study examines the representation of money politics in the documentary film Amplop Demokrasi and the younger generation's perception of this phenomenon in the Indonesian regional elections. Money politics is a persistent problem in local democracy and is considered to undermine the principles of honesty and fairness in general elections. The film

Amplop Demokrasi depicts various practices of money politics, such as distributing envelopes, dawn raids, and secretly giving money to the public to influence voters' political choices. This study aims to analyze how the practice of money politics is represented in the film and how the younger generation interprets this representation. This research method is qualitative with Stuart Hall's representation theory approach. Data were obtained from observations of the documentary and interviews with five Political Science students of the class of 2023 selected using a purposive sampling technique. The results showed that the film Amplop Demokrasi has become a culture in society. In addition, the younger generation views the practice of money politics as an act that damages the quality of democracy because people tend to vote based on material rewards rather than the quality of the candidate. The documentary also raises awareness among the younger generation about the importance of maintaining an honest, fair, and free democracy from the practice of money politics, strengthening public awareness, and active participation of the younger generation in the democratic process. This research also shows that documentary films can be a political education tool for the younger generation, helping them understand various issues in Indonesian democracy. Students, as a pressure group in society, are expected to play a role in creating more integrity-based regional elections.
Keywords: Money Politics, Regional Elections, Representation, Young Generation, Democracy

**Keywords :** Money Politics, Regional Elections, Representation, Young Generation, Democracy

## LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan politik (Purnamawati, 2020). Di Indonesia pelaksanaan demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung berdasarkan visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan oleh para kandidat. Seharusnya proses demokrasi tersebut berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari berbagai bentuk tekanan maupun praktik yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat. Namun dalam praktiknya proses demokrasi di tingkat lokal seringkali diwarnai oleh berbagai penyimpangan, salah satunya adalah praktik politik uang.

Politik uang merupakan upaya mempengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian uang, barang, atau bentuk materi lainnya agar masyarakat memilih kandidat tertentu (Yusuf dkk., 2024). Praktik ini tidak hanya merusak prinsip demokrasi yang seharusnya berlandaskan kebebasan dan kesadaran politik masyarakat, akan tetapi juga mendorong terbentuknya budaya politik transaksional. Ketika pilihan politik didasarkan pada imbalan materi, maka tentu saja kualitas demokrasi menjadi lemah karena pemilih tidak lagi mempertimbangkan kapasitas dan integritas calon pemimpin. Dalam sistem hukum Indonesia praktik politik uang pada dasarnya telah dilarang secara tegas. Hal ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 187A yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi pidana (Asnawi & Mulyana, 2018). Meskipun begitu dalam kenyataannya praktik tersebut masih sering terjadi dalam berbagai kontestasi politik di daerah.

Fenomena politik uang juga digambarkan dalam film dokumenter Amplop Demokrasi. Film (Documentary Watchdoc, 2026) menunjukkan bagaimana praktik politik uang dilakukan secara sistematis dalam proses Pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Film tersebut merupakan hasil riset yang menyoroti bagaimana mahalnya biaya politik mendorong kandidat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan pemilih. Salah satu kasus yang ditampilkan dalam film dokumenter ini adalah praktik serangan fajar, yaitu pemberian uang kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Selain itu juga film Amplop Demokrasi juga menampilkan berbagai cara yang digunakan oleh tim sukses untuk membagikan uang kepada masyarakat secara terselubung. Dalam salah satu adegan diperlihatkan bagaimana uang diselipkan di balik stiker atau atribut tertentu sebelum diberikan kepada pemilih. Cara tersebut dilakukan untuk menyamarkan praktik politik uang agar tidak terlihat secara langsung sebagai bentuk transaksi politik. Adegan tersebut menggambarkan bahwa praktik politik uang tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, tetapi seringkali dilakukan dengan cara-cara yang halus dan sulit terdeteksi.

Jika kita telah lebih dalam lagi, fenomena politik uang ini tidak hanya menjadi persoalan dalam ranah politik formal atau parlementer, tetapi juga memunculkan dinamika dalam ranah ekstra-parlementer. Ekstra-parlementer tersebut merujuk pada aktivitas politik di luar lembaga formal seperti DPR atau partai politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, aktivis, organisasi non-pemerintah, serta komunitas sosial lainnya. Dalam konteks ini gerakan ekstra-parlementer memiliki peran penting sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap praktik-praktik demokrasi yang menyimpang, termasuk politik uang. Gerakan ekstra-parlementer ini seringkali hadir dalam bentuk kampanye anti politik uang dan aksi demonstrasi yang menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil. Di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa mereka mempunyai posisi yang kuat sebagai kelompok penekan yang bisa mengontrol kebijakan (Hanifah, 2025), kesadaran terhadap bahaya politik uang mulai dibangun melalui diskusi publik, gerakan literasi politik, serta kritik terhadap praktik demokrasi yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat di luar sistem parlementer.

Film Amplop Demokrasi juga menunjukkan bagaimana masyarakat terkadang menerima praktik tersebut sebagai hal yang biasa dalam proses pemilihan. Segala bentuk politik uang yang diberikan kepada pemilih maka hal tersebut akan mempengaruhi pilihan mereka (Begouvic & Cuan, 2021). Sebagian masyarakat menganggap pemberian uang sebagai bentuk bonus politik yang dapat dimanfaatkan menjelang pemilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya berkaitan dengan perilaku kandidat atau tim sukses, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Di tengah kondisi inilah generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan

demokrasi. Generasi muda sebagai pemilih pemula diharapkan memiliki kesadaran politik yang lebih peka serta mampu melihat praktik politik uang sebagai sesuatu yang merusak nilai demokrasi (Maharani & Mandira, 2024). Persepsi generasi muda terhadap fenomena politik uang menjadi penting untuk dikaji, karena pandangan mereka dapat memengaruhi sikap politik serta partisipasi mereka dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada.

Penelitian ini menggunakan teori representasi Stuart Hall untuk menganalisis bagaimana praktik politik uang direpresentasikan dalam film dokumenter Amplop Demokrasi. Menurut Hall, representasi adalah proses produksi dan pertukaran makna melalui Bahasa, symbol, gambar, maupun media. Representasi bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami suatu fenomena sosial. Hall menyatakan bahwa makna dikonstruksi melalui sistem representasi yang terdiri dari konsep dan Bahasa, sehingga media mempunyai peran dalam membentuk pemahaman audiens terhadap suatu peristiwa sosial (Misbakhul Huda, 2023). Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, film dokumenter Amplop Demokrasi merepresentasikan praktik politik uang, serangan fajar, serta strategi tim sukses dalam mempengaruhi pemilih. Representasi tersebut kemudian dapat membentuk persepsi generasi mudah terhadap praktik politik uang sebagai bagian dari realitas dari demokrasi di Indonesia.

Untuk memperkuat arah penelitian dan melihat posisi penelitian yang dilakukan, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Allan Fatchan Gani Wardhana, 2020) dalam jurnal berjudul "Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam" membahas bagaimana praktik politik uang dilihat dari kacamata perspektif demokrasi dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang merusak demokrasi karena menghilangkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Selain itu juga dalam pandangan Islam politik uang dikategorikan sebagai risywah atau suap yang hukumnya haram. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik politik uang dalam pemilu. Sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Allan lebih menitikberatkan pada perspektif demokrasi dan Islam terhadap politik uang.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Putra, 2025) dalam jurnal berjudul Pengaruh Politik Uang terhadap Pilihan Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024 di Kota Padang. Penelitian tersebut membahas bagaimana praktik politik uang memengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilkada. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah oleh sebagian masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, sosial, serta pengalaman pemilu sebelumnya. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat terkadang menerima praktik politik uang sebagai bagian dari budaya politik dalam pemilu. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena sama-samab membahas praktik politik uang dalam Pilkada serta pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat terhadap demokrasi. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian Heru Permana Putra lebih menitikberatkan pada pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat secara

umum di Kota Padang, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada representasi praktik politik uang dalam film Amplop Demokrasi serta bagaimana persepsi generasi muda terhadap fenomena tersebut.

Penelitian terdahulu digunakan untuk landasan dalam memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk menemukan perbedaan, kesamaan, dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu hingga saat ini penelitian terkait politik uang lebih banyak membahas pengaruhnya terhadap perilaku para pemilih yang dilihat dari perspektif hukum dan demokrasi. Sementara itu, penelitian yang mengkaji representasi politik uang pilkada dalam film dokumenter masih relatif terbatas. Oleh kaarena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan penelitian ini melalui film dokumenter Amplop Demokrasi.

Berdasarkan celah penelitian, rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisis isi teks media dan metode wawancara Bersama informan generasi muda. Langkah ini digunakan untuk mengurai dua fokus utama, yaitu bagaimana bentuk praktik politik uang (seperti pembagian amplop, serangan fajar, dan penyelipan uang pada stiker) direpresentasikan dalam film Amplop Demokrasi, dan bagaimana representasi visual tersebut mengkonstruksi persepsi generasi muda setelah menyaksikan film tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar strategi representasi politik uang di media sekaligus menganalisis dampaknya secara nyata terhadap kesadaran generasi muda selaku motor penggerak demokrasi masa depan berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh para peneliti.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis representasi Stuart Hall. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana praktik politik uang direpresentasikan dalam film Amplop Demokrasi dan bagaimana persepsi generasi muda dalam memaknai representasi tersebut dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menelusuri dan menganalisis berbagai peristiwa sosial atau sikap manusia. Dengan metode ini akan menghasilkan penjelasan dalam bentuk narasi dan mencerminkan pendapat subjek secara rinci seperti yang didapatkan dari informan (Wulan dkk., 2025) . Objek dalam penelitian ini adalah film dokumenter Amplop Demokrasi yang diterbitkan lewat Youtube oleh *Wathdoc Documentary*. Film ini dipilih karena menampilkan berbagai praktik politik uang dalam pilkada di Indonesia, seperti pembagian amplop, serangan fajar, da strategi tim sukses dalam mempengaruhi para pemilih.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari para narasumber. Data ini bisa diperoleh melalui observasi, dan wawancara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara seperti data, buku, jurnal, dan laporan lainnya yang sudah ada sebelumnya (Arvyanda, 2023). Dalam penelitian ini data Primer didapatkan melalui observasi terhadap film dokumenter dan wawancara langsung dengan limai informan yang berasal dari mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023. Pemilihan iforman dilakukan secara

*pusposive sampling,* menurut Sugiyono (2022) *purposive sampling* adalah teknik penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu sesuai keperluan penelitian (Tamba dkk., 2022) . Adapun kriteria narasumbernya yaitu mahasiswa Jurusan Ilmu Politik angkatan 2023, mereka dipilih karena beberapa dari angkatan ini sudah pernah menonton bersama film dokumenter ini, dan sudah mempunyai pengalaman bahkan mengikuti pencoblosan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selanjutnya data skunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penlitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Cresweel (2014), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan pasrtisipan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta perspektif individu terhadap fenomena yang diteliti. Selain wawancara penelitian ini juga menggunakan teknik observasi Bogdan dan Biklen (2017) yang menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung partisipan maupun situasi yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Menurut Creswell (2014), dokumentasi digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konteks historis, kebijakan, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observai sehingga data yang didapatkan valid (Andriani dkk., 2025). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati adegan, dialog, dan narasi dalam film. Selanjutnya wawancara kepada lima mahasiswa Jurusan Ilmu Politik. Terakhir, dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis untuk yang relevan untuk mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Representasi Praktik Politik Uang Dalam Film Dokumenter Amplop Demokrasi

Film dokumenter Amplop Demokrasi merepresentasikan praktik politik uang sebagai fenomena yang masih melekat kedalam proses demokrasi lokal di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melalui berbagai macam adegan, dialog, dan narasi yang diperlihatkan, film ini menggambarkan bagaimana raktik politik uang dilakukan dengan banyak cara oleh para kandidat ataupun tim sukses untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Representasi ditampikan melalui pembagian amplop, pemberian uang secara langsung, dan penyelipan uang dalam atribut politik seperti stiker paslon untuk mempengaruhi pilihan para pemilih.

Perpektif Hall, Media bukan hanya berfungsi untuk menampilkan realitas sosial, tetapi juga membentuk makna terhadap realitas melalui Bahasa, simbol, visual, dan tanda yang ditampilkan media (Nur Windha Garnita & Suryanto Suryanto, 2025). Oleh karena itu, film Amplop Demokrasi bukan sekedar memperlihatkan bahwa poltik uang terjadi dalam pilkada, namun hal ini juga bisa membangun pemahaman bahwa praktik ini sudah menjadi hal yang yang memang membudaya di masyarakat Indonesia. Adanya Visual dan narasi yang ditampilkan, penonton diarahkan agar lebih peka dan paham bahwa politik uang bukan lagi praktik yang asing dalam demokrasi Indonesia.

Simbol amplop dalam film bukan sekedar memaknai sebagai benda fisik yang berisi uang, tetapi direpresentasikan sebagai symbol politik transaksional yang menggambarkan

hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Amplop menjadi symbol bagaimana suara rakyat bisa mdipengaruhi oleh kekuatan materi dalam proses demokrasi. Selain itu, adegan pembagian uang menjelang hari pencoblosan atau serangan fajar merepresentasikan praktik politik yang dilakukan secara sembunyi untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Visual dalam film membangun makna bahwa praktik politik uang tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, tetapi dapat disamarkan agar terlihat sebagai hal yang biasa dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Sehingga muncul normalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Pada film dokumenter Amplop Demokrasi, praktik politik uang direpresentasikan sebagai bentuk pembajakan demokrasi, dimana suara masyarakat tidak lagi dilihat sebagai bentuk partisipasi politik yang bebas, melainkan sebagai komoditas yang bisa dipertukarkan dengan uang, sembako, ataupun pemberian lainnya. Berbagai adegan, narasi, dan keterangan para narasumber membangun makna bahwa amplop bukan pemberian biasa, namun sebagai simbol dari relasi kuasa yang timpang dan melanggengkan dominasi para elite. Para elite mengeksploitasi keterbatasan ekonomi untuk membentuk pola ketergantungan, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan uang dari aktor politik mereja justru bertanya-tanya (Dekki Mahroza, 2024). Penonton diarahkan untuk memahami politik uang bukan sekedar transaksi kecil dalam pilkada tetapi sebagai persoalan struktural dalam demokrasi lokal.

Representasi politik uang pada film dokumenter ini terlihat dari adegan pembagian uang terhadap masyarakat menjelang hari pemungutan suara atau sering disebut dengan serangan fajar. Adegan itu menggambarkan bagaimana para tim sukses mendatangi masyarakat untuk memberikan uang agar mencoblos kandidat tertentu. Politik uang adalah Upaya mempengaruhi pilihan pemilih lewat pemberian uang maupun barang agar memilih kandidat tertentu (Moh Maliki, Hasanuddin, 2025). Visual pembagian uang yang ada pada film menjadi simbol dari hubungan transaksional antara kandidat dan masyarakat dalam proses demokrasi. Politik uang bukan hanya dilakukan secara terbuka tetapi juga dilakukan secara tersembunyi supaya tidak mudah diketahui sebagai bentuk pelanggaran pemilu. Beberapa adegan ada penyelipan uang di balik stiker atau atribut politik sebelum diserahkan kepada masyarakat. Representasi tersebut terlihat poltik uang sudah berkembang menjadi praktik yang dilakukan dengan berbagai cara agar tidak diketahui oleh para pengawas.

Film dokumenter ini juga merepresentasikan biaya politik dalam pilkada yang mahal. Kandidat digambarkan harus mengeluarkan modal yang besar untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang bukan sekedar dipengaruhi parilaku individu, namun juga oleh sistem politik yang mendorong kandidat menggunakan cara-cara yang pragmatis untuk mendapatkan basis suara. Politik uang merusak kejujuran dan keadilan dalam demokrasi karena pilihan politik masyarakat sudah dipengaruhi oleh imbalan materi bukan karena visi dan misi (Reika dkk., 2026). Representasi membangun makna bahwa demokrasi dalam pelaksanaannya masih dibaluti dengan kekuatan ekonomi dan kepentingan politik tertentu. Sangat disayangkan akibat dari politik uang.

Representasi politik uang dalam film dokumenter Amplop Demokrasi juga diperkuat dari hasil wawancara dengan informan. Informan pertama mengatakan bahwa praktik politik uang adalah Tindakan yang merusak demokrasi karena Pilkada seharusnya berlangsung

secara jujur dan adil. Informan juga menilai bahwa politik uang masih banyak terjadi di nasional maupun lokal. Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa informan mengartikan representasi politik uang dalam film sebagai bentuk penyimpangan demokrasi berdasarkan pengalaman dan pemahaman politik yang dipunyai. Informan kedua juga mengatakan bahwa poltik uang sudah menjadi sesuatu yang wajar dalam masyarakat untuk memobilisasi pilihan pemilih. Jadi ada keterkaitan dengan kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat. Karena informan menyatakan sudah terbiasa melihat kejadian ini dilingkungannya, sehingga film ini dianggap memang sesuai dengan gambaran nyata kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Sehingga makna yang dibangun dalam film mempunyai keterikatan dengan pengalaman sosial para informan. Dalam teori Hall, audiens bukan hanya menerima pesan media secara pasif, tetapi juga memaknai representasi berdasarkan pengslaman dan kondisi sosial yang mereka alami.

Informan ketiga menyatakan setelah menonton film tersebut dirinya sadar bahwa praktik politik uang bukan hanya terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, namun juga banyak terjadi di daerah lain. Informan keempat juga menilai film ini memperlihatkan bagaimana praktik politik uang dirancang untuk mendapatkan basis suara. Bahkan informan mengaitlan tayangan film dengan pengalaman dilingkungan desanya, dimana ada tim sukses yang memberikan uang terhadap masyarakat untuk memilih calon tertentu. Informal kelima menyatakan bahwa politik uang membuat masyarakat memilih bukan karena kualitas tetapi karena imbalan materi sesaat. Pernyataan dari seluruh informan menunjukkan representasi politik uang dalam film mempunyai kedekatan dengan pengalaman para audies dan informan ssehingga pesan yang disampaikan jadi lebih cepat dipahami dan direnungi oleh generasi mada.

**B. Persepsi Generasi Muda Terhadap Representasi Politik Uang Dalam Film Amplop Demokrasi**

Persepsi generasi muda dalam penelitian ini diperoleh dari lima informan mahasiswa Ilmu Politik yang telah menonton film dokumenter Amplop Demokrasi. Setelah menyaksikan film tersebut, para informan memberikan pandangan mengenai praktik politik uang yang direpresentasikan dalam film serta keterkaitannya dengan realitas demokrasi di Indonesia. Melalui berbagai adegan yang menampilkan pembagian uang, serangan fajar, hingga strategi tim sukses dalam memobilisasi pemilih, film ini membangun pemahaman bahwa politik uang masih menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

Adapun dalam teori representasi Stuart Hall, media tidak hanya menampilkan realitas sosial, tetapi juga membentuk makna terhadap realitas tersebut melalui bahasa, simbol, dan visual yang ditampilkan (Ica, A. (2024). Film Amplop Demokrasi merepresentasikan politik uang sebagai praktik yang merusak demokrasi karena proses pemilihan tidak lagi didasarkan pada kualitas calon pemimpin, melainkan dipengaruhi oleh imbalan materi. Representasi tersebut kemudian dimaknai oleh generasi muda berdasarkan pengalaman sosial dan kondisi politik yang mereka lihat di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan memandang politik uang sebagai tindakan yang berdampak buruk terhadap demokrasi. Informan pertama menyatakan bahwa politik uang merusak demokrasi karena Pilkada seharusnya berjalan secara jujur dan adil. Informan juga menilai bahwa praktik tersebut masih sering terjadi baik

di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu juga informan menjelaskan bahwa kandidat seringkali hanya mendekati masyarakat ketika membutuhkan suara, namun setelah terpilih mereka melupakan janji-janji politik yang pernah diberikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa representasi politik uang dalam film dipahami sebagai bentuk penyimpangan demokrasi yang mempunyai dampak buruk terhadap hubungan antara pemimpin dan masyarakat(Fitra & Prihatmoko, 2026).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan kedua yang menganggap bahwa politik uang sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam masyarakat untuk memobilisasi pilihan pemilih. Informan bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu terkejut dengan isi film karena praktik politik uang memang sudah sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa representasi yang ditampilkan dalam film dianggap sesuai dengan realitas demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam kondisi tersebut politik uang tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang luar biasa, akan tetapi sudah mengalami normalisasi sosial di masyarakat.

Sementara itu informan ketiga menyatakan bahwa setelah menonton film Amplop Demokrasi dirinya baru menyadari bahwa praktik politik uang ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, tetapi juga terjadi di banyak daerah lain. Representasi yang ditampilkan dalam film membuat informan memahami bahwa politik uang merupakan persoalan yang luas dan sudah mengakar dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter mampu membangun kesadaran politik generasi muda mengenai besarnya pengaruh politik uang dalam proses Pilkada.

Informan keempat juga perpendapat dan menilai bahwa film tersebut memperlihatkan bagaimana praktik politik uang dirancang secara sistematis untuk memperoleh suara masyarakat. Informan mengaitkan isi film dengan pengalaman di lingkungan desanya, dimana terdapat tim sukses yang memberikan uang kepada masyarakat agar memilih calon tertentu. Kedekatan antara representasi dalam film dengan pengalaman nyata para informan membuat pesan yang disampaikan film menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh generasi muda.

Selain itu juga informan kelima berpendapat bahwa politik uang membuat masyarakat memilih pemimpin bukan berdasarkan kualitas, visi, dan integritas calon, melainkan karena imbalan materi sesaat. Informan juga menilai bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus mengembalikan modal politik dibanding memperhatikan kepentingan masyarakat. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa generasi muda memahami dampak jangka panjang politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa film Amplop Demokrasi berhasil membentuk persepsi generasi muda terhadap praktik politik uang dalam Pilkada. Film ini tidak hanya merepresentasikan realitas politik secara visual, tetapi juga mendorong generasi muda untuk lebih sadar bahwa politik uang merupakan ancaman bagi demokrasi yang jujur dan adil. Generasi muda memandang bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya politik yang sulit dihilangkan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran politik, dan lemahnya pengawasan dalam proses pemilihan (Wafiyah, S. 2025). Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa film ini

berhasil membangun persepsi generasi muda terhadap praktik politik uang dalam pilkada. Film ini bukan hanya merepresentasikan realitas politik secara visual, tetapi juga mendorong generasi muda untuk lebih sadar bahwa politik uang mengancam demokrasi.

Di sisi lain hasil wawancara juga menunjukkan bahwa generasi muda memiliki harapan agar praktik politik uang dapat dikurangi melalui pendidikan politik, penguatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Para informan menilai bahwa generasi muda harus lebih peka terhadap praktik politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas serta program kerja yang ditawarkan. Dengan demikian, representasi politik uang dalam film Amplop Demokrasi tidak hanya membangun persepsi negatif terhadap praktik money politik, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran politik generasi muda untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Mahasiswa sebagai kelompok penekan diharapkan bisa menjadi pengamat sekaligus mengontrol pemerintahan bahkan bisa membuka edukasi kepada masyarakat agar kesadaran politik masyarakat dan generasi muda meningkat.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter *Amplop Demokrasi* merepresentasikan praktik politik uang sebagai bentuk penyimpangan demokrasi yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Representasi tersebut terlihat melalui adegan pembagian amplop, serangan fajar, dan pemberian uang secara terselubung yang membentuk pemahaman bahwa demokrasi sering dipengaruhi kepentingan materi. Berdasarkan hasil wawancara, generasi muda memandang politik uang sebagai tindakan yang merusak kejujuran dan kualitas demokrasi karena masyarakat memilih pemimpin bukan berdasarkan kemampuan, melainkan imbalan sesaat. Oleh karena itu pemerintah, penyelenggara pemilu dan lembaga pendidikan disarankan untuk meningkatkan pendidikan politik serta pengawasan Pilkada. Generasi muda juga diharapkan lebih aktif dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA

Allan Fatchan Gani Wardhana. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajianperspektif Demokrasi Dan Islam. Journal Of Islamic And Law Studies, 4(2), 1–14.

Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif : Literature Review Memecahkan Masalah Melalui Pengumpulan , Pengolahan , Analisis Data , Dan Penarikan Menguji Hipotesis , Seringkali Berfokus Pada Generalisasi Temuan Ke Populasi Yang Lebi. 6(4), 6238–6247. Https://Doi.Org/10.54373/Imeij.V6i4.3783

Arvyanda, R. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa. 1(1).

Asnawi, A., & Mulyana, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(2), 138. Https://Doi.Org/10.35194/Jhmj.V4i2.467

Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. Sol Justicia, 4(2), 105–122. Https://Doi.Org/10.54816/Sj.V4i2.451

Dekki Mahroza. (2024). Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Pasca Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Politik,Hukum Dan Budaya. Ilmu Dan Budaya, 45, 79–94. Https://Doi.Org/10.47313/Jidb.V45i2.3810

Documentary Watchdoc. (2026). Amplop Demokrasi [Video Recording]. Www.Youtube.Com.

Fitra, N. V., & Prihatmoko, J. J. (2026). Analisis Representasi Kekuasaan Politik Film Dirty Vote Dalam Perspektif Norman Fairclough. 23(1).

Hanifah, L. (2025). Environmental Justice And Islamic Ethics: A Conversation With Anna M. Gade. Maarif, 19(1), 47–62. Https://Doi.Org/10.47651/Mrf.V19i2.258

Ica, A. (2024). Teori Representasi Stuart Hall: Mengungkap Makna Dalam Media Dan Budaya: Perspektif Teori Stuart Hall. Sanak: Jurnal Studi Agama-Agama, 2(2).

Maharani, N., & Mandira, I. M. C. (2024). Peran Generasi Muda Sebagai Wujud Partisipasi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ubj, 7(2), 111–118. Https://Doi.Org/10.31599/Wnptcp11

Misbakhul Huda. (2023). Representasi Semangat Nasionalisme Dalam Film 'Garuda 19' (Analisis Representasi Stuart Hall). Studi Komunikasi Penyiaran Islam, 1–5.

Moh Maliki, Hasanuddin, A. M. (2025). Politik Uang Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Jurnal Naira, 18(2), 645–661. Https://Doi.Org/10.31849/6rm14f94

Nur Windha Garnita, & Suryanto Suryanto. (2025). Representasi Disabilitas Dalam Film Anime "Josee, The Tiger, And The Fish" Menggunakan Analisis Semiotika Roland Barthes. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 2(5), 145–156. Https://Doi.Org/10.69714/Mewxvd66

Purnamawati, E. (2020). Metodologi Penelitian Keperawatan: Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis. Solusi, 18(2), 251–264. Https://Doi.Org/10.36546/Solusi.V18i2.290

Putra, H. P. (2025). Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang. Jisip-Unja, 9(1), 111–121. Https://Doi.Org/10.22437/Jisipunja.V9i1.43004

Reika, D., Yumna, U., Ananta, M. I., Putri, A. N., & Mutiara, A. (2026). Politik Uang Dan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Indonesia 2019: Ancaman Dan Dampak Politik Uang Terhadap Keterwakilan Demokratis.

Tamba, S., Sianipar, H. H., & Sihombing, S. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Ips Siswa Kelas Ix Di Uptd Smp Negeri 4 Pematang Siantar T. P 2023 / 2024. Jurnal Sains Student Research, 1(2), 284–292. Https://Doi.Org/10.61722/Jssr.V1i2.136

Wulan, N., Palupi, I., Ummah, S. R., & Larasati, P. (2025). Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial. Jurnal Riset Humaniora Dan Penddikan, 188–198. Https://Doi.Org/10.62383/Risoma.V3i4.860

Wafiyah, S. (2025). Persepsi Tentang Politik Uang Dalam Pilkada 2024 Di Kalangan Generasi Zoomers (Gen Z) Di Kelurahan Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak (Doctoral Dissertation, Universitas Ivet).

Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, Muh. F. R. (2024). Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. Indonesian Journal Of Legality Of Law, 7(1), 104–108. Https://Doi.Org/10.35965/Ijlf.V7i1.5342